**HASIL PENGAWASAN**

1. **Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana**
   1. **Pelaksanaan Cuti Tahunan/Sisa Cuti Tahun Lalu**

**Kondisi :**

Terdapat pegawai yang menggunakan hak Cuti tahunan pada periode 2 tahun yang lalu.

**Kriteria :**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS);

2. Peraturan BKN nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil;

3. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor 13 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Cuti Bagi Hakim dan Aparatur Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya.

**Sebab:**

Kurangnya pemahaman petugas cuti

**Akibat :**

Jumlah hak cuti melebihi yang seharusnya.

**Rekomendasi:**

Agar pengelola Kepegawaian melakukan sosialisasi:

1. Peraturan BKN nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Romawi III huruf a angka 10)

2. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor 13 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Cuti Bagi Hakim dan Aparatur Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya (Huruf F angka 1.h, halaman 9)

* 1. **Penertiban Pengisian e-LLK oleh ASN**

**Kondisi :**

Masih terdapat pegawai yang belum tertib dalam pengisian e-LLK (Elektronik Laporan Lembar Kerja);

**Kriteria :**

Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 106-1/SEK/KU.01/5/2016, tanggal 25 Mei 2016 tentang Aplikasi e-LLK sebagai pengukur kinerja secara elektronik yang digunakan untuk pembayaran Tunjangan Kinerja;

**Sebab :**

Kurangnya pemahaman para pegawai tentang pengisian e-LLK yang harus diisi secara rutin;

**Akibat :**

pegawai belum tertib dalam mengisi e-LLK*;*

**Rekomendasi :**

agar dilaksanakan sosialiasasi pengisian e-LLK kepada pegawai agar dapat dilakukan pengisian e-LLK secara tertib dan teratur;

* 1. **Penertiban pembuatan dan pengumpulan SKP dan PPK**

**Kondisi :**

Masih terdapat pegawai yang belum membuat dan mengumpulkan Sasaran Kinerja Pegawai dan Penilaian Kinerja Pegawai Tahun 2021.

**Kriteria :**

1. Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS);

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 8 tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil;

3. Surat Edaran Surat Edaran SE Kepala BKN (Badan Kepegawaian Negara) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021;

**Sebab :**

Kurangnya kesadaran pegawai dalam pembuatan Sasaran Kinerja Pegawai dan Penilaian Kinerja Pegawai;

**Akibat :**

Dokumen administrasi kepegawaian tidak lengkap*;*

**Rekomendasi :**

Agar segera membuat SKP dan PPK tahun 2021;

* 1. **Keterlambatan Usulan Pensiun Janda/Duda atas nama Yusuf Yukkas**

**Kondisi :**

Adanya keterlambatan pengusulan Pensiun PNS yang sudah meninggal per tanggal 01 Juli 2022

**Kriteria:**

1. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1119/SEK/KP/06/7/2019 tanggal 16 Juli 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usul Pertimbangan Teknis (Pertek) Pensiun BKN dan SK Sekretaris Mahkamah Agung RI tentang Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;

2. Peraturan BKN Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda PNS

**Sebab :**

Keluarga dari ybs belum mengumpulkan kelengkapan administratif untuk pensiun janda/duda;

**Akibat :**

Usul pensiun atas nama Yusuf Yukkas belum dapat terealisasi;

**Rekomendasi :**

Segera berkoordinasikan dengan keluarga ybs untuk melengkapi kelengkapan berkas Pensiun ASN atas nama Yusuf Yukkas.

1. **Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan**
   1. **Website**

**Kondisi :**

Masih terdapat menu pada website yang belum terupdate antara lain: Profil pegawai, Struktur Organisasi, IKU 2022, PKT 2022.

**Kriteria :**

1. Surat Dirjen Badilum MA-RI nomor 362/Dju/HM.02.3/IV/2015 tanggal 16 April Tahun 2015 tentang Standarisasi website Pengadilan;

2. Surat Keputusan Dirjen Badilum 1364/DJU/SK/Hm.02.3/5/2021 tentang Standarisasi website pengadilan di lingkungan peradilan umum;

**Sebab:**

Website Pengadilan Negeri Kendari masih dalam proses perbaikan sehingga update data masih dalam proses.

**Akibat :**

Informasi yang diberikan kepada masyarakat tidak lengkap dan akurat.

**Rekomendasi:**

Agar standarisasi yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung dan Dirjen Badilum segera dilengkapi:

* 1. **Backup data SIPP**

**Kondisi :**

Backup data SIPP belum dilakukan setiap hari;

**Kriteria :**

Intruksi Dirjen Badilum nomor 3102/Dju/SK/HM.02.3/9/2019 tentang Pengelolaan Backup Data Register, Arsip Perkara Secara Elektronik Serta Pemeliharan Registrasi Dan Arsip Perkara Manual;

**Sebab :**

Kurangnya pemahaman pengelola IT dalam melakukan backup secara rutin dan kurangnya monev terhadap backup SIPP;

**Akibat :**

Backup data SIPP yang ada merupakan data lama*;*

**Rekomendasi :**

1. Agar backup data SIPP dilakukan setiap hari sehingga apabila server bermasalah, data SIPP aman.

2. Agar dilakukan monev minimal seminggu sekali

* 1. **Standar Operasional Prosedur (SOP)**

**Kondisi :**

Terdapat SOP yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**Kriteria :**

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan di Bawahnya;

**Sebab :**

Kurangnya pemahaman tim pembuatan SOP;

**Akibat :**

SOP tidak sesuai standar*;*

**Rekomendasi :**

Agar tim pembuatan SOP mempelajari Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan di Bawahnya;

**HASIL PENGAWASAN**

**PENGADILAN NEGERI KENDARI**

**A. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana**

1. Terdapat pegawai yang menggunakan hak Cuti tahunan pada periode 2 tahun yang lalu

2. Masih terdapat pegawai yang belum tertib dalam pengisian e-LLK (Elektronik Laporan Lembar Kerja)

3. Masih terdapat pegawai yang belum membuat dan mengumpulkan Sasaran Kinerja Pegawai dan Penilaian Kinerja Pegawai Tahun 2021

4. Adanya keterlambatan pengusulan Pensiun PNS yang sudah meninggal

**B. Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan**

1. Masih terdapat menu pada website yang belum terupdate antara lain: Profil pegawai, Struktur Organisasi, IKU 2022, PKT 2022

2. Backup data SIPP belum dilakukan setiap hari

3. Terdapat SOP yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku